

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PRODUK DAN PERIZINAN LABEL PRODUK

SKINCARE DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Diawal Tahun 2025 hasil intensifikasi pengawasan yang dilakukan oleh BPOM ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang. Melalui siaran pers kepala BPOM merilis daftar kosmetik mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang ada 16 item kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Ada 10 item merupakan kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi, sedangkan 6 item lainnya merupakan kosmetik impor. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi perizinan label produk skincare di Indonesia, analisis tanggung jawab produk dan perizinan label produk skincare dalam perspektif keadilan, serta upaya penanggulangan tindak pidana peredaran produk skincare yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk. Regulasi perizinan label produk skincare pada dasarnya untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa produk skincare yang beredar sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk. Memiliki informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam label produk skincare. Guna mendekati masalah ini digunakan teori tanggung jawab produk, teori keadilan, dan teori penanggulangan kejahatan. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembenahan sosialisasi regulasi, pengawasan yang lebih ketat, serta kesadaran dari seluruh pihak terkait.

Kata Kunci: *Tanggung jawab produk, perizinan, keadilan*

ABSTRACT

PRODUCT RESPONSIBILITY AND LICENSING OF SKINCARE

PRODUCT LABELS IN THE PERSPECTIVE OF JUSTICE

This article aims to analyze skincare product label licensing regulations in Indonesia, examine product liability and label licensing for skincare products from the perspective of justice, and explore efforts to combat criminal acts involving the distribution of skincare products that fail to meet quality and safety standards. The problem is focused on the discovery—at the beginning of 2025—of 16 cosmetic items containing harmful and/or prohibited substances, including 10 contract-manufactured products and 6 imported products, and the necessity to ensure that all skincare products on the market comply with established quality and safety standards. In order to approach this problem, the theoretical reference of product liability theory, justice theory, and crime prevention theory is used. The data is collected through a literature review and analyzed qualitatively. This study concludes that improved dissemination of regulatory information, stricter enforcement by BPOM, and heightened awareness among all relevant parties are required to ensure consumer protection and the integrity of skincare product labeling.

Keywords: Product Responsibility; Licensing; Justice.